



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : P.65/MenLHK-Setjen/2015

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA
34 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, terdapat beberapa urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 Kepada 34 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
17. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH.

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Taman Hutan Raya adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
7. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), Taman Buru dan Hutan Lindung.
8. Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
9. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
10. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

11. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
12. Jasa Lingkungan adalah suatu produk yang dapat atau tidak dapat diukur secara langsung berupa Jasa Wisata Alam/rekreasi, Perlindungan Sistem Hidrologi, Kesuburan Tanah, Pengendalian Erosi dan Banjir, Keindahan, Keunikan dan Kenyamanan.
13. Ekosistem esensial adalah ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau dan wilayah pasang surut dengan tidak lebih dari 6 (enam) meter), mangrove dan gambut yang berada di luar KSA dan KPA.
14. *Hot Spot* adalah informasi dari citra satelit mengenai lokasi kebakaran hutan atau lahan.
15. Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih.
16. Batas Kawasan Hutan adalah batas luar kawasan hutan dan/atau batas fungsi kawasan hutan.
17. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
18. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.
19. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHP) adalah satu kesatuan pengusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi.
20. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

21. Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya.
22. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
23. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
24. Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu adalah konsep pembangunan yang mengakomodir berbagai peraturan perundang-undangan dan dijabarkan secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu rencana jangka pendek, menengah maupun panjang yang memuat perumusan masalah spesifik di dalam DAS, sasaran dan tujuan pengelolaan, arahan kegiatan dalam pemanfaatan, peningkatan pelestarian sumber daya alam air, tanah dan vegetasi, pengembangan sumber daya manusia, arahan model pengelolaan DAS, serta sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan DAS.

25. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) adalah strategi operasionalisasi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional pada wilayah provinsi.
27. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan konservasi sumber daya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan peredaran benih dan/atau bibit.
28. Perairan Darat adalah semua bentuk perairan yang terdapat di darat, meliputi mata air, air yang mengalir di permukaan bergerak menuju ke daerah-daerah yang lebih rendah membentuk sungai, danau, rawa dan lain-lain yang memiliki suatu pola aliran yang dinamakan Daerah Aliran Sungai (DAS).
29. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara dan/atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan/atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan.
30. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
31. Hutan Hak atau Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah.

32. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah biaya perjalanan tetap dan perlengkapan penunjang yang disediakan kepada penyuluh kehutanan untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
33. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi yang memiliki kewenangan dibidang penyuluhan kehutanan.
34. Penyuluhan kehutanan adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat sehingga menjadi tahu, mau, dan mampu melakukan kegiatan pembangunan hutan dan kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.
35. Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan individu petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama dalam rangka pembangunan usaha hutan tanaman dalam rangka kesejahteraan anggotanya.
36. Tenurial adalah hak pemangkuan dan penguasaan terhadap lahan dan sumber daya alam yang dikandungnya.

37. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
38. Peredaran Hasil Hutan adalah lalu lintas angkutan hasil hutan yang dimulai dari blok tebangan (di hutan) sampai ke tempat/industri pengolahan kayu/hasil hutan lainnya.
39. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
40. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
41. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.
42. Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan.
43. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.

44. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
45. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
46. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari ekosistem hutan.
47. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
48. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan efektivitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil pemerintah di dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB III PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu Jenis Dekonsentrasi

Pasal 3

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada 34 Gubernur pemerintah provinsi.
- (2) Rincian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur tidak boleh dilimpahkan kepada bupati/walikota maupun kepada kepala desa.

- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2016.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Setelah menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur menetapkan perangkat pengelola keuangan yang meliputi kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan kuasa pengguna anggaran/barang dan perangkat pengelola keuangan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Gubernur di dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

- (5) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibiayai oleh bagian anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016.
- (6) Pelaksanaan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (8) Perencanaan kegiatan dan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi yang telah ditetapkan Gubernur untuk menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan yang dilimpahkan, dikoordinasikan oleh Sekretariat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan Dekonsentrasi

Pasal 5

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan pada akhir tahun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan yang dilimpahkan wajib melaporkan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan :

- a. Bidang lingkungan hidup kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - b. Bidang kehutanan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
 - (3) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
 - (4) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 :
 - a. Bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - b. Bidang kehutanan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pembinaan administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang didekonsentrasikan kepada Gubernur.

- (5) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan *review* atas laporan keuangan dana dekonsentrasi dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (6) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang didekonsentrasikan, apabila :
 - a. Menteri mengubah kebijakan; dan/atau
 - b. Gubernur melaksanakan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) penerima dana dekonsentrasi yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada Menteri dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan.

- (2) Sanksi penundaan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan, apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan kantor pelayanan perbendaharaan negara setempat dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran Eselon I sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (3) Penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.
- (4) Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan dana dekonsentrasi.
- (5) Penghentian pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak menyampaikan laporan keuangan tiga bulanan kepada Menteri secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah.
- (6) Menteri menetapkan keputusan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 134

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.65/MenLHK-Setjen/2015
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL
PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
I	Gubernur Aceh	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
	21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
	22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
	23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
	24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
II	Gubernur Sumatera Utara	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
	21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
	22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
	23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
	24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
III	Gubernur Sumatera Barat	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
	21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
	22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
	23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
	24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
IV	Gubernur Riau	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Pengawasan Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan oleh Prov/Kab/Kota	
			20	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	21	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			22	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			23	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			24	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			25	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
V	Gubernur Kepulauan Riau	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Pengawasan Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan oleh Prov/Kab/Kota	
			20	Verifikasi Pengaduan Permasalahan <u>Lingkungan</u>	
		Pengendalian Perubahan Iklim	21	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			22	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			23	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			24	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			25	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
VI	Gubernur Jambi	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
	21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
	22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
	23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
	24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
VII	Gubernur Sumatera Selatan	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
	21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
	22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
	23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
	24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
VIII	Gubernur Bangka Belitung	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
	21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
	22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
	23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
	24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
IX	Gubernur Bengkulu	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
	21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
	22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
	23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
	24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
X	Gubernur Lampung	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
	21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
	22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
	23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
	24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XI	Gubernur Banten	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
	21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
	22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
	23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
	24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan				
		Komponen	No.	Sub Komponen		
XII	Gubernur DKI Jakarta	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan		
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan		
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan		
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler		
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota		
			6	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi		
			7	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi		
			8	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi		
			9	Inspeksi Lapangan Proper		
			10	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper		
			11	Supervisi Pelaksanaan Proper		
			12	Penyampaian Rapor Proper Provinsi		
			13	Masa Sanggahan Proper Provinsi		
			14	Evaluasi Sanggahan Proper		
			15	Pembahasan Peringkat Final Proper		
			Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
			Pengendalian Perubahan Iklim	17	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
		18		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
		19		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
		20		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
		21		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XIII	Gubernur Jawa Barat	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Pengawasan Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan oleh Prov/Kab/Kota	
			20	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	21	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			22	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			23	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			24	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			25	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XIV	Gubernur Jawa Tengah	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Pengawasan Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan oleh Prov/Kab/Kota	
			20	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	21	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			22	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			23	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			24	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			25	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XV	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
	21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
	22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
	23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
	24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XVI	Gubernur Jawa Timur	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Pengawasan Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan oleh Prov/Kab/Kota	
			20	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	21	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			22	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			23	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			24	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			25	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XVII	Gubernur Bali	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XVIII	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
	21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
	22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
	23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
	24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XIX	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
	21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
	22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
	23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
	24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XX	Gubernur Kalimantan Barat	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
	21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
	22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
	23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
	24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXI	Gubernur Kalimantan Tengah	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
	21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
	22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
	23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
	24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

Kegiatan

: Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXII	Gubernur Kalimantan Selatan	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
	21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
	22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
	23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
	24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

Kegiatan

: Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXIII	Gubernur Kalimantan Timur	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Pengawasan Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan oleh Prov/Kab/Kota	
			20	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	21	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			22	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			23	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			24	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			25	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXIV	Gubernur Kalimantan Utara	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	10	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
	11		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
	12		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
	13		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
	14		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXV	Gubernur Sulawesi Utara	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan				
		Komponen	No.	Sub Komponen		
XXVI	Gubernur Gorontalo	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan		
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan		
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan		
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler		
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota		
			6	Pengambilan sampel air sungai		
			7	Analisa sampel air sungai		
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai		
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi		
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi		
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi		
			12	Inspeksi Lapangan Proper		
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper		
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper		
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi		
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi		
			17	Evaluasi Sanggahan Proper		
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper		
			Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
			Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
		21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
		22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
		23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
		24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

Kegiatan

: Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXVII	Gubernur Sulawesi Selatan	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
	21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
	22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
	23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
	24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

Kegiatan

: Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXVIII	Gubernur Sulawesi Barat	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
	21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
	22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
	23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
	24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan				
		Komponen	No.	Sub Komponen		
XXIX	Gubernur Sulawesi Tengah	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan		
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan		
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan		
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler		
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota		
			6	Pengambilan sampel air sungai		
			7	Analisa sampel air sungai		
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai		
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi		
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi		
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi		
			12	Inspeksi Lapangan Proper		
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper		
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper		
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi		
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi		
			17	Evaluasi Sanggahan Proper		
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper		
			Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
			Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
		21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
		22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
		23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
		24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan				
		Komponen	No.	Sub Komponen		
XXX	Gubernur Sulawesi Tenggara	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan		
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan		
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan		
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler		
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota		
			6	Pengambilan sampel air sungai		
			7	Analisa sampel air sungai		
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai		
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi		
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi		
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi		
			12	Inspeksi Lapangan Proper		
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper		
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper		
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi		
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi		
			17	Evaluasi Sanggahan Proper		
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper		
			Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
			Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
		21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
		22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
		23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
		24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXXI	Gubernur Maluku	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
	21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
	22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
	23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
	24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan				
		Komponen	No.	Sub Komponen		
XXXII	Gubernur Maluku Utara	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan		
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan		
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan		
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler		
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota		
			6	Pengambilan sampel air sungai		
			7	Analisa sampel air sungai		
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai		
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi		
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi		
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi		
			12	Inspeksi Lapangan Proper		
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper		
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper		
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi		
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi		
			17	Evaluasi Sanggahan Proper		
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper		
			Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
			Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
		21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
		22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
		23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
		24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXXIII	Gubernur Papua	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	10	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			11	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			12	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			13	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			14	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program
Kegiatan

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
: Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan				
		Komponen	No.	Sub Komponen		
XXXIV	Gubernur Papua Barat	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan		
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan		
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan		
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler		
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota		
			6	Pengambilan sampel air sungai		
			7	Analisa sampel air sungai		
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai		
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi		
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi		
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi		
			12	Inspeksi Lapangan Proper		
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper		
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper		
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi		
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi		
			17	Evaluasi Sanggahan Proper		
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper		
			Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
			Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
		21		Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
		22		Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
		23		Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
		24		Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.65/MenLHK-Setjen/2015
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL
PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
I	Gubernur Aceh	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya	
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya	
			4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			5	Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi	
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			8	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya	
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Taman Hutan Raya	
			11	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Taman Hutan Raya	
			12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			14	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			16	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	18	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			19	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			20	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			21	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	

		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
I	Gubernur Aceh	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1 22	Fasilitasi Pengeloaan Taman Hutan Raya Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23 24	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	25 26 27 28	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	42 43 44	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	

		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
I	Gubernur Aceh	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			45	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			46	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	

			47	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
			48	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
			49	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	50	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			51	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			52	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
			53	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	
			54	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	
			55	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	
			56	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	
			57	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi	
			58	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi	
			59	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK	
			60	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi	
			61	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK	
			62	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku	
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	63	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
			64	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
			65	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
			66	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			67	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			68	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	

		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
I	Gubernur Aceh	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1 69 70	Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan Lomba Wana Lestari	

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.65/MenLHK-Setjen/2015
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL
 PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
I	Gubernur Aceh	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya	
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya	
			4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			5	Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi	
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			8	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya	
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Taman Hutan Raya	
			11	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Taman Hutan Raya	
			12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			14	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			16	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	18	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			19	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			20	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			21	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			22	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			24	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	25	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			26	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			27	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			28	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	29	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			30	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			31	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			32	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			33	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	
			34	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			35	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			36	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi	
			37	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL	
			38	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			39	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			40	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			41	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	42	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			43	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			44	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			45	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			46	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			47	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
			48	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
			49	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	50	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			51	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			52	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
			53	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	
			54	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	
			55	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	
			56	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	
			57	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi	
			58	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi	
			59	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK	
			60	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi	
			61	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK	
			62	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku	
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	63	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
			64	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
			65	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
			66	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			67	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
	68	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan			
	69	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan			
	70	Lomba Wana Lestari			

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
II	Gubernur Sumatera Utara	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya	
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya	
			4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			5	Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi	
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			8	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya	
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			11	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			14	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			16	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	18	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			19	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			20	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			21	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			22	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			24	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	25	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			26	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			27	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			28	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	29	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			30	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			31	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			32	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			33	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	
			34	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			35	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			36	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi	
			37	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL	
			38	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			39	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			40	Fasilitasi Pemantauan Peningkatan Kualitas Air Danau Prioritas Oleh Tim Provinsi	
			41	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			42	Penyusunan Profil Perairan Darat	
			Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	43	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial
44	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial				
45	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial				
46	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial				
			47	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			48	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
			49	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
			50	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			51	Pertemuan Teknis Dalam Rangka Koordinasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat	
			52	Pengumpulan Data dan Informasi Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat	
			53	Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat	
			54	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Tenurian dan Masyarakat Hukum Adat	
			Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	55	
		56	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan		
		57	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan		
		58	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam		
		59	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman		
		60	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi		
		61	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi		
		62	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi		
		63	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi		
		64	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK		
		65	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi		
		66	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK		
		67	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku		
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	68	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
69	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan				
70	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan				
71	Peningkatan Kapasitas SDM Penvuluh Kehutanan				

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			72	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			73	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
			74	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			75	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
III	Gubernur Sumatera Barat	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya	
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya	
			4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			5	Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi	
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			8	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya	
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			11	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			14	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			16	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	18	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			19	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			20	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			21	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			22	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			24	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan				
		Jenis yang Dilimpahkan							
		Komponen	No.	Sub Komponen					
		Planologi dan Tata Lingkungan	25	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan					
			26	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan					
			27	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan					
			28	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi					
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	29	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi					
			30	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi					
			31	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi					
			32	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi					
			33	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP					
			34	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS					
			35	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS					
			36	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi					
			37	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL					
			38	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan					
			39	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi					
			40	Fasilitasi Pemantauan Peningkatan Kualitas Air Danau Prioritas Oleh Tim Provinsi					
			41	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi					
			42	Penyusunan Profil Perairan Darat					
						Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	43	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
							44	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
45	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial								
46	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial								
			47	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial					
			48	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial					

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan		
		Jenis yang Dilimpahkan					
		Komponen	No.	Sub Komponen			
			49	Pengembangan Kewirausahaan			
			50	Perhutanan Sosial			
			51	Monitoring dan Evaluasi			
			52	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			
			53	Pertemuan Teknis Dalam Rangka Koordinasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat			
			54	Pengumpulan Data dan Informasi Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat			
			55	Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat			
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	56	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat			
			57	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			
			58	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan			
			59	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan			
			60	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam			
			61	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman			
			62	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi			
			63	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi			
			64	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi			
			65	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi			
			66	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK			
			67	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi			
			68	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK			
		69	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku				
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	70	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan			
			71	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan			
			72	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan			
			73	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan			
					74	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			73	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
			74	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			75	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
IV	Gubernur Riau	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya	
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya	
			4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			5	Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi	
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			8	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya	
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			11	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			14	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			16	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	18	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			19	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			20	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			21	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			22	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan		
		Jenis yang Dilimpahkan					
		Komponen	No.	Sub Komponen			
		Planologi dan Tata Lingkungan	24	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi			
			25	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan			
			26	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan			
			27	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan			
			28	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi			
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	29	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi			
			30	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi			
			31	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi			
			32	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi			
			33	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP			
			34	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS			
			35	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS			
			36	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi			
			37	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL			
			38	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan			
			39	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi			
			40	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi			
			41	Penyusunan Profil Perairan Darat			
			Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	42		Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
				43		Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
				44		Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
45	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial						
46	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						
			47	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial			
			48	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial			

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan		
		Jenis yang Dilimpahkan					
		Komponen	No.	Sub Komponen			
			49	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			
			50	Pertemuan Teknis Dalam Rangka Koordinasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat			
			51	Pengumpulan Data dan Informasi Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat			
			52	Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat			
			53	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat			
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	54	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			
			55	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan			
			56	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan			
			57	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam			
			58	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman			
			59	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi			
			60	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan			
			61	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi			
			62	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi			
			63	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK			
			64	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi			
			65	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK			
			66	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku			
			Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	67		Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
				68		Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
69	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan						
70	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan						
71	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya						
			72	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan			

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			73	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			74	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
VI	Gubernur Jambi	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya	
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya	
			4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			5	Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi	
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			8	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya	
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			11	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			14	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			16	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	18	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			19	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			20	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			21	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			22	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			24	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	25	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			26	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			27	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			28	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	29	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			30	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			31	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			32	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			33	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	
			34	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			35	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			36	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi	
			37	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL	
			38	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			39	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			40	Fasilitasi Pemantauan Peningkatan Kualitas Air Danau Prioritas Oleh Tim Provinsi	
			41	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			42	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	43	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
44	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial				
45	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial				
46	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial				
			47	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan		
		Jenis yang Dilimpahkan					
		Komponen	No.	Sub Komponen			
			48	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial			
			49	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial			
			50	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			
			51	Pertemuan Teknis Dalam Rangka Koordinasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat			
			52	Pengumpulan Data dan Informasi Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat			
			53	Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat			
			54	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Tenurian dan Masyarakat Hukum Adat			
				Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan		55	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
56	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan						
57	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan						
58	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam						
59	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman						
60	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi						
61	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi						
62	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi						
63	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi						
64	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK						
65	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi						
66	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK						
67	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku						
	Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	68			Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan		
		69			Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan		
		70	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan				
		71	Peningkatan Kapasitas SDM Penvuluh Kehutanan				

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			72	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			73	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
			74	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			75	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
VII	Gubernur Sumatera Selatan	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			2	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			3	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			4	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			5	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			6	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	8	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			9	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			10	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			11	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			12	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			14	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	15	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			16	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			17	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			18	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	19	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			20	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			21	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			22	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			23	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			24	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			25	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			26	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi	
			27	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL	
			28	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			29	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			30	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			31	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	32	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			33	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			34	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			35	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			36	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			37	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
			38	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
			39	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			40	Pertemuan Teknis Dalam Rangka Koordinasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat	
			41	Pengumpulan Data dan Informasi Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat	
			42	Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat	
			43	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	44	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			45	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			46	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			47	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	
			48	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	
			49	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi	
			50	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi	
			51	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK	
			52	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi	
			53	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK	
			54	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku	
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	55	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
			56	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
			57	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
			58	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			59	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			60	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
			61	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			62	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
VIII	Gubernur Bangka Belitung	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			2	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			3	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			4	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			5	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			6	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	8	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			9	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			10	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			11	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			12	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			14	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	15	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			16	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			17	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			18	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	19	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			20	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			21	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			22	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			23	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			24	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			25	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			26	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi	
			27	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL	
			28	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			29	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			30	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			31	Penyusunan Profil Perairan Darat	
			Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	32	
		33		Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
		34		Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
		35		Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
		36		Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		37		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
		38		Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
		39		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan		40	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
			41	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			42	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
			43	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	
			44	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi	
			45	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi	
			46	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK	
			47	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	48	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
			49	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
			50	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
			51	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			52	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			53	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
			54	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			55	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
IX	Gubernur Bengkulu	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya	
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya	
			4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			5	Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi	
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			8	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya	
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			11	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			14	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			16	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	18	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			19	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			20	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			21	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			22	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
			Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			24	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	25	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			26	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			27	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			28	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	29	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			30	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			31	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			32	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			33	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	
			34	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			35	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			36	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi	
			37	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL	
			38	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			39	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			40	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			41	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	42	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			43	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			44	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
45	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial				
46	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				
			47	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
			48	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan		
		Jenis yang Dilimpahkan					
		Komponen	No.	Sub Komponen			
			49	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			
			50	Pertemuan Teknis Dalam Rangka Koordinasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat			
			51	Pengumpulan Data dan Informasi Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat			
			52	Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat			
			53	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Tenurian dan Masyarakat Hukum Adat			
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	54	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			
			55	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan			
			56	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan			
			57	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam			
			58	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman			
			59	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi			
			60	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi			
			61	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi			
			62	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi			
			63	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK			
			64	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi			
			65	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK			
			66	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku			
			Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	67		Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
				68		Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
69	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan						
70	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan						
			71	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya			
			72	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan			

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			73	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			74	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
X	Gubernur Lampung	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya	
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya	
			4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			5	Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi	
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			8	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya	
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			11	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			14	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			16	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	18	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			19	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			20	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			21	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			22	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			24	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	25	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			26	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			27	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			28	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	29	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			30	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			31	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			32	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			33	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	
			34	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			35	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			36	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi	
			37	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL	
			38	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			39	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
		40	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi		
		41	Penyusunan Profil Perairan Darat		
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	42	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
43	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial				
44	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial				
45	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial				
46	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				
		47	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial		

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan				
		Komponen	No.	Sub Komponen		
			48	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial		
			49	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
			50	Pertemuan Teknis Dalam Rangka Koordinasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat		
			51	Pengumpulan Data dan Informasi Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat		
			52	Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat		
			53	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Tenurian dan Masyarakat Hukum Adat		
			Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	54		Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
		55	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan			
		56	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan			
		57	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman			
		58	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi			
		59	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi			
		60	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi			
		61	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi			
		62	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK			
		63	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi			
		64	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK			
		65	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku			
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	66	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan		
		67	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan			
		68	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan			
69	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan					
70	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya					
			71	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan		

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			72	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			73	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XI	Gubernur Banten	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya	
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya	
			4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			5	Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi	
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			8	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya	
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			11	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			14	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			16	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	18	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			19	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			20	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			21	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			22	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			24	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Planologi dan Tata Lingkungan	25	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			26	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	27	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			28	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			29	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			30	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			31	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	
			32	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			33	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			34	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			35	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			36	Fasilitasi Pemantauan Peningkatan Kualitas Air Danau Prioritas Oleh Tim Provinsi	
			37	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			38	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	39	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			40	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			41	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			42	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			43	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			44	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
			45	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
			46	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	47	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			48	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			49	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
			50	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK	
			51	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku	
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
			53	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
			54	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
			55	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			56	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			57	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
			58	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			59	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XII	Gubernur DKI Jakarta	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			2	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			3	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			4	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			5	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			6	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			9	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	10	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	11	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			12	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			13	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			14	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	
			15	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			16	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			17	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			18	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	19	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK	
			20	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku	
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
			22	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
			23	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			24	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			25	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			26	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
			27	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			28	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XIII	Gubernur Jawa Barat	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya	
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya	
			4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			5	Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi	
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			8	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya	
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			11	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			14	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			16	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	18	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			19	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			20	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			21	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			22	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			24	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	25	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			26	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	27	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			28	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			29	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			30	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			31	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	
			32	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			33	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			34	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			35	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			36	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			37	Penyusunan Profil Perairan Darat	
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	38	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial			
	39	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial			
	40	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial			
	41	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial			
	42	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			
	43	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial			
	44	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial			
	45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	46	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			47	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			48	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
			49	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	
			50	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK	
			51	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku	
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
			53	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
			54	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
			55	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			56	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			57	Monitoring dan Evaluasi Penyelengg. Penyuluhan Khtnan	
			58	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			59	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XIV	Gubernur Jawa Tengah	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya	
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya	
			4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			5	Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi	
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			8	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya	
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			11	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			14	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			16	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	18	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			19	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			20	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			21	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			22	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			24	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	25	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			26	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
	Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung		27	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			28	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			29	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			30	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			31	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	
			32	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			33	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			34	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			35	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			36	Penyusunan Profil Perairan Darat	
	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan		37	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			38	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			39	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			40	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			41	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			42	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
			43	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
			44	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan		
		Jenis yang Dilimpahkan					
		Komponen	No.	Sub Komponen			
	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	45	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)				
		46	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan				
		47	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan				
		48	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman				
		49	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK				
		50	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku				
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	51	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan			
			52	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan			
			53	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan			
			54	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan			
	55		Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya				
	56		Monitoring dan Evaluasi Penyelengg. Penyuluhan Khtn				
	57		Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan				
	58		Lomba Wana Lestari				

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XV	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya	
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya	
			4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			5	Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi	
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			8	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya	
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			11	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			14	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			16	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	18	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			19	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			20	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			21	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			22	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			24	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	25	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
				26	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	27	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			28	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			29	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			30	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			31	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	
			32	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			33	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			34	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			35	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			36	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			37	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	38	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			39	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			40	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			41	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			42	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			43	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
			44	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
			45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	1	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
		2	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan		

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			3	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
			4	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK	
			5	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku	
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
			7	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
			8	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
			9	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			10	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			11	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
			12	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			13	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XVI	Gubernur Jawa Timur	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya	
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya	
			4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			5	Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi	
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			8	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya	
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			11	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			14	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			16	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	18	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			19	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			20	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			21	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			22	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			24	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	25	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			26	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	27	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			28	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			29	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			30	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			31	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	
			32	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			33	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			34	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			35	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			36	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			37	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	38	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			39	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			40	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			41	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			42	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			43	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
			44	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
			45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	46	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			47	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			48	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
			49	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	
			50	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK	
			51	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku	
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
			53	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
			54	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
			55	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			56	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			57	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
			58	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			59	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan			
		Jenis yang Dilimpahkan						
		Komponen	No.	Sub Komponen				
XVII	Gubernur Bali	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengeloaan Taman Hutan Raya				
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya				
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya				
			4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya				
			5	Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi				
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya				
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya				
			8	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya				
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya				
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura				
			11	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura				
			12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial				
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial				
			14	Penetapam Kawasan Ekosistem Esensial				
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial				
			16	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial				
			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial				
				Pengendalian Perubahan Iklim		18	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
						19	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
						20	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
						21	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
	22	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan						

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			24	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	25	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			26	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			27	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			28	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	29	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			30	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			31	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			32	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			33	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	
			34	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			35	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			36	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi	
			37	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL	
			38	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			39	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			40	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			41	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	42	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			43	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			44	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			45	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			46	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			47	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
			48	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
			49	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	50	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	
			51	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	
			52	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK	
			53	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku	
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	54	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
			55	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
			56	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
			57	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			58	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			59	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
			60	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			61	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XIX	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			2	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			3	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			4	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			5	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			6	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	8	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			9	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			10	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			11	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			12	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			14	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	15	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			16	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			17	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			18	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	19	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			20	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			21	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			22	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			23	Fasilitasi Rencana Pengelolaan DAS Lintas Negara	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			24	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	
			25	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			26	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			27	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi	
			28	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL	
			29	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			30	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			31	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			32	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	33	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			34	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			35	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			36	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			37	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			38	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
			39	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
			40	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			41	Pertemuan Teknis Dalam Rangka Koordinasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat	
			42	Pengumpulan Data dan Informasi Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat	
			43	Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat	
			44	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Tenurian dan Masyarakat Hukum Adat	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	45	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			46	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			47	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
			48	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	
			49	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi	
			50	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi	
			51	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK	
			52	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi	
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
			54	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
			55	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
			56	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			57	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			58	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
			59	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			60	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XX	Gubernur Kalimantan Barat	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			2	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			3	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			4	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			5	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			6	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	8	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			9	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			10	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			11	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			12	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13	Patroli/ Operasi Pengamanan Hutan	
			14	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	15	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			16	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			17	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			18	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	19	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			20	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			21	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			22	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			23	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			24	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			25	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			26	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			27	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			28	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			29	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	30	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			31	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			32	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			33	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			34	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			35	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
			36	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
			37	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	38	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			39	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			40	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
			41	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	
			42	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	
			43	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi	
			44	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi	
			45	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK	
			46	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi	
			47	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK	
			48	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	49	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
			50	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
			51	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
			52	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			53	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			54	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
			55	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			56	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXI	Gubernur Kalimantan Tengah	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengeloaan Taman Hutan Raya	
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya	
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya	
			4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			5	Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi	
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			8	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya	
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			11	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			14	Penetapam Kawasan Ekosistem Esensial	
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			16	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	18	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			19	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			20	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			21	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			22	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			24	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	25	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			26	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			27	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			28	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	29	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			30	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			31	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			32	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			33	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	
			34	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			35	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			36	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi	
			37	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL	
			38	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			39	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			40	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			41	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	42	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			43	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			44	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			45	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			46	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			47	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
			48	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
			49	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	50	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			51	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			52	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
			53	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	
			54	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	
			55	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	
			56	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	
			57	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi	
			58	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi	
			59	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK	
			60	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi	
			61	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK	
			62	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku	
			Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	63	
		64		Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
		65		Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
		66		Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
		67		Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
68	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan				
69	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan				
70	Lomba Wana Lestari				

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXIII	Gubernur Kalimantan Timur	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			2	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			3	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			4	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			5	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			6	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	8	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			9	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			10	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			11	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			12	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			14	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	15	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			16	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			17	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			18	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	19	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			20	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			21	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			22	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			23	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	
			24	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			25	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			26	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			27	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			28	Fasilitasi Pemantauan Peningkatan Kualitas Air Danau Prioritas Oleh Tim Provinsi	
			29	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			30	Penyusunan Profil Perairan Darat	
			Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	31	
		32		Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
		33		Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
		34		Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
		35		Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		36		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	37	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
38	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				
39	Pertemuan Teknis Dalam Rangka Koordinasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat				
40	Pengumpulan Data dan Informasi Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat				
41	Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat				
42	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat				
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	43	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			44	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			45	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			46	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	
			47	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	
			48	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi	
			49	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi	
			50	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK	
			51	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi	
			52	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK	
			53	Koordinasi dan Supervisi <u>Pengendalian Bahan Baku</u>	
			Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	54	
		55		Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
		56		Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
		57		Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
		58		Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			59	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
	60	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan			
	61	Lomba Wana Lestari			

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXIV	Gubernur Kalimantan Utara	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengeloaan Taman Hutan Raya	
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya	
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya	
			4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			5	Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi	
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			8	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya	
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			11	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			14	Penetapam Kawasan Ekosistem Esensial	
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			16	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	18	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			19	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			20	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			21	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			22	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			24	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	25	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			26	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			27	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			28	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	29	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			30	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			31	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			32	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			33	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	
			34	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			35	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			36	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi	
			37	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL	
			38	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			39	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			40	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			41	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	42	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			43	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			44	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			45	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			46	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan				
		Komponen	No.	Sub Komponen		
			47	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial		
			48	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial		
			49	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
			50	Pertemuan Teknis Dalam Rangka Koordinasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat		
			51	Pengumpulan Data dan Informasi Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat		
			52	Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat		
			53	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Tenurian dan Masyarakat Hukum Adat		
			Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	54		Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
		55	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan			
		56	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan			
		57	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam			
		58	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman			
		59	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi			
		60	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi			
		61	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi			
		62	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi			
		63	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK			
		64	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi			
		65	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK			
		66	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku			
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	67	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan		
		68	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan			
		69	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan			
		70	Peningkatan Kapasitas SDM Penvuluh Kehutanan			

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			71	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			72	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
			73	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			74	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXV	Gubernur Sulawesi Utara	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			2	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			3	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			4	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			5	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			6	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	8	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			9	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			10	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			11	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			12	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			14	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	15	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			16	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			17	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			18	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	19	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			20	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			21	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			22	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			23	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			24	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			25	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			26	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			27	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			28	Fasilitasi Pemantauan Peningkatan Kualitas Air Danau Prioritas Oleh Tim Provinsi	
			29	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			30	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	31	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			32	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			33	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			34	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			35	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			36	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
			37	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
			38	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	39	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			40	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			41	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
			42	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	
			43	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi	
			44	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi	
			45	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK	
			46	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi	
			47	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	48	Koordinasi dan Supervisi	
			49	Pengendalian Bahan Baku	
				Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
			50	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
			51	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
			52	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			53	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			54	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
			55	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			56	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXVI	Gubernur Gorontalo	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			2	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			3	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			4	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			5	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			6	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	8	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			9	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			10	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			11	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			12	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			14	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	15	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			16	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			17	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			18	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	19	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			20	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			21	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			22	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			23	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			24	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			25	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			26	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi	
			27	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL	
			28	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			29	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			30	Fasilitasi Pemantauan Peningkatan Kualitas Air Danau Prioritas Oleh Tim Provinsi	
			31	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			32	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	33	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			34	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			35	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			36	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			37	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			38	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
			39	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
			40	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	41	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			42	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			43	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
			44	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	
			45	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	
			46	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi	
			47	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan				
		Komponen	No.	Sub Komponen		
			48	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK		
			49	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi		
			50	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK		
			51	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku		
			Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
				53	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
				54	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
				55	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
				56	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
				57	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
				58	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
				59	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan		
		Jenis yang Dilimpahkan					
		Komponen	No.	Sub Komponen			
XXVII	Gubernur Sulawesi Selatan	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya			
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya			
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya			
			4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya			
			5	Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi			
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya			
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya			
			8	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya			
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya			
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura			
			11	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura			
			12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial			
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial			
			14	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial			
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial			
			16	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial			
			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial			
			Pengendalian Perubahan Iklim	18		Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
				19		Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
				20		Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
				21		Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
	22	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan					

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			24	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	25	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			26	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			27	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			28	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	29	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			30	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			31	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			32	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			33	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	
			34	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			35	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			36	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			37	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			38	Fasilitasi Pemantauan Peningkatan Kualitas Air Danau Prioritas Oleh Tim Provinsi	
			39	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			40	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	41	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			42	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			43	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			44	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			45	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			46	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			47	Pengembangan Kewirausahaan	
			48	Perhutanan Sosial	
			48	Monitoring dan Evaluasi	
			49	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			49	Pertemuan Teknis Dalam Rangka Koordinasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat	
			50	Pengumpulan Data dan Informasi Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat	
			51	Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat	
			52	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	53	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			54	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			55	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
			56	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	
			57	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	
			58	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	
			59	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi	
			60	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi	
			61	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK	
			62	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi	
			63	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK	
			64	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku	
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	65	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
			66	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
			67	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
			68	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			69	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			70	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			71	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			72	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXVIII	Gubernur Sulawesi Barat	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			2	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			3	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			4	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			5	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			6	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	8	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			9	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			10	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			11	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			12	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			14	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	15	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			16	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			17	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			18	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	19	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			20	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			21	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			22	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			23	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			24	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			25	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			26	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi	
			27	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL	
			28	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			29	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			30	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			31	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	32	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			33	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			34	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			35	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			36	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			37	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
			38	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
			39	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	40	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			41	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			42	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
			43	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	
			44	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	
			45	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi	
			46	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi	
			47	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			48	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi	
			49	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK	
			50	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku	
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	51	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
			52	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
			53	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
			54	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			55	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			56	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
			57	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			58	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan		
		Jenis yang Dilimpahkan					
		Komponen	No.	Sub Komponen			
XXIX	Gubernur Sulawesi Tengah	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengeloaan Taman Hutan Raya			
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya			
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya			
			4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya			
			5	Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi			
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya			
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya			
			8	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya			
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya			
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura			
			11	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura			
			12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial			
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial			
			14	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial			
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial			
			16	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial			
			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial			
			Pengendalian Perubahan Iklim	18		Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
				19		Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
				20		Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
				21		Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
	22	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan					

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			24	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	25	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			26	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			27	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			28	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	29	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			30	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			31	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			32	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			33	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	
			34	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			35	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			36	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			37	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			38	Fasilitasi Pemantauan Peningkatan Kualitas Air Danau Prioritas Oleh Tim Provinsi	
			39	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			40	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	41	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			42	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			43	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			44	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			45	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			46	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			47	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
			48	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	49	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			50	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			51	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
			52	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	
			53	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	
			54	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	
			55	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	
			56	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi	
			57	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi	
			58	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK	
			59	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi	
			60	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK	
			61	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku	
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	62	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
			63	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
			64	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
			65	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			66	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			67	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
			68	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			69	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXX	Gubernur Sulawesi Tenggara	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya	
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya	
			4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			5	Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi	
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			8	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya	
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			11	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			14	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			16	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	18	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			19	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			20	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			21	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			22	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			24	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	25	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			26	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			27	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			28	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	29	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			30	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			31	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			32	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			33	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	
			34	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			35	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			36	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi	
			37	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL	
			38	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			39	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			40	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			41	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	42	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			43	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			44	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			45	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			46	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			47	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
			48	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
			49	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			50	Pertemuan Teknis Dalam Rangka Koordinasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat	
			51	Pengumpulan Data dan Informasi Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat	
			52	Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat	
			53	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Tenurian dan Masyarakat Hukum Adat	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	54	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			55	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			56	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
			57	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	
			58	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	
			59	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	
			60	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi	
			61	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi	
			62	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK	
			63	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi	
			64	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK	
			65	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku	
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	66	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
			67	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
			68	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
			69	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			70	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			71	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
			72	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			73	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXXI	Gubernur Maluku	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			2	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			3	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			4	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			5	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			6	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	8	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			9	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			10	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			11	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			12	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			14	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	15	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			16	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			17	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			18	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	19	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			20	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			21	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			22	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			23	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			24	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			25	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			26	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi	
			27	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL	
			28	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			29	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			30	Fasilitasi Pemantauan Peningkatan Kualitas Air Danau Prioritas Oleh Tim Provinsi	
			31	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			32	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	33	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			34	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			35	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			36	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			37	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			38	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
			39	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
			40	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	41	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			42	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			43	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
			44	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	
			45	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	
			46	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi	
			47	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			48	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK	
			49	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi	
			50	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK	
			51	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku	
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
			53	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
			54	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
			55	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			56	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			57	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
			58	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			59	Lomba Wana Lestari	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXXII	Gubernur Maluku Utara	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			2	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			3	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			4	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			5	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			6	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	8	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			9	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			10	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			11	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			12	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			14	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	15	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			16	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			17	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			18	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	19	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			20	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			21	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			22	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			23	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			24	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			25	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			26	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi	
			27	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL	
			28	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			29	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			30	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			31	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	32	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			33	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			34	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			35	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			36	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			37	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
			38	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
			39	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	40	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			41	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			42	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
			43	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	
			44	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	
			45	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi	
			46	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi	
			47	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK	
			48	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			49	Koordinasi dan Supervisi	
			50	Pengembangan Informasi IPHHK	
				Koordinasi dan Supervisi	
				Pengendalian Bahan Baku	
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	51	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
			52	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
			53	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
			54	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			55	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			56	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
	57	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan			
		58	Lomba Wana Lestari		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXXIII	Gubernur Papua	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			2	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			3	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			4	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			5	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			6	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	8	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			9	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			10	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			11	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			12	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			14	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	15	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			16	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			17	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			18	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	19	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			20	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			21	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			22	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			23	Fasilitasi Rencana Pengelolaan DAS Lintas Negara	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan				
		Komponen	No.	Sub Komponen		
			24	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP		
			25	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS		
			26	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS		
			27	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi		
			28	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL		
			29	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan		
			30	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi		
			31	Fasilitasi Pemantauan Peningkatan Kualitas Air Danau Prioritas Oleh Tim Provinsi		
			32	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi		
			33	Penyusunan Profil Perairan Darat		
			Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	34		Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial
				35		Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial
				36		Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial
		37		Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial		
		38		Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
		39		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial		
		40		Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial		
		41		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
		42		Pertemuan Teknis Dalam Rangka Koordinasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat		
		43		Pengumpulan Data dan Informasi Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat		
		44		Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat		
		45		Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat		

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan		
		Jenis yang Dilimpahkan					
		Komponen	No.	Sub Komponen			
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	46	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			
			47	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan			
			48	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan			
			49	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam			
			50	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman			
			51	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi			
			52	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi			
			53	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK			
			54	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi			
			55	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK			
			56	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku			
			Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	57		Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
				58		Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
				59		Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
				60		Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
				61		Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
				62		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
63	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan						
64	Lomba Wana Lestari						

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXXIV	Gubernur Papua Barat	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies dan genetik Taman Hutan Raya	
			2	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			3	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			4	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			5	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			6	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Pengendalian Perubahan Iklim	8	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			9	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			10	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			11	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			12	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
			14	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
		Planologi dan Tata Lingkungan	15	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
			16	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			17	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			18	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	19	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			20	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			21	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			22	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			23	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			24	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS	
			25	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
			26	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi	
			27	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL	
			28	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
			29	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			30	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			31	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	32	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			33	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			34	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			35	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			36	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			37	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	
			38	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	
			39	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	40	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			41	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			42	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
			43	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	
			44	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	
			45	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi	
			46	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi	
			47	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			48	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi	
			49	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK	
			50	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku	
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	51	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	
			52	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	
			53	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan	
			54	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			55	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya	
			56	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
			57	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan	
			58	Lomba Wana Lestari	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA